

Peranan Konseling dalam Pemberian Bantuan pada Ranah Kepolisian

Mona^{1*}, Margaretha Tri Astuti¹, Nur Aliza¹, Yeni Juwita¹, Daniel Ade. K¹
Affan Yusra²

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling,
Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

¹ monapuspita@gmail.com, ¹ trimargaretha1@gmail.com, ¹ nuralizaa07@gmail.com,
¹ juwitaveni14@gmail.com, ¹ danielputratrr@gmail.com, ² affan15yusra@unja.ac.id

(*: Corresponden Author)

Abstrak : Proses konseling sendiri diperlukan untuk dilakukannya pemeriksaan kesehatan yang meliputi mental, serta fisik, fokus kesejahteraan yang disarankan untuk mengurangi stigma konsultasi untuk masalah, menguntungkan individu secara langsung; membuat penghematan keuangan untuk organisasi (misalnya, mengurangi ketidakhadiran karena sakit); dan mengurangi tekanan ketidakhadiran pada staf lain. Metode penelitian yang akan digunakan dalam hal ini adalah *literature review* dimana melalui database Google Scholar yang menggunakan keyword “Konseling di Kepolisian”, “Konseling”, dan “Polisi”. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa kepolisian sama halnya seperti masyarakat umum sama-sama memiliki kesehatan baik secara fisik maupun psikis yang bisa juga terganggu. Penyediaan konseling, pelatihan dan kepemimpinan bagi kepolisian perlu ditingkatkan menjadi lebih baik dan diwajibkan untuk diikuti oleh setiap anggota polisi. Hal ini dikatakan karena dalam dunia kerja dikepolisian tentu setiap anggota memiliki kenangan atau mengalami insiden yang dapat merusak pribadi polisi tersebut secara tidak langsung. Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dalam dunia kesehatan, public, pendidikan serta lainnya saja yang membutuhkan konseling, namun pihak kepolisian pun juga membutuhkan peranan konselor yang membantu mereka konseling dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh setiap anggota kepolisian. .

Kata Kunci: Konseling di Kepolisian, Konseling, Polisi

Abstract : *The counseling process itself is needed to carry out a health examination that includes mental, as well as physical, a focus on well-being which is recommended to reduce the stigma of consultation for problems, benefiting the individual directly; make financial savings for the organization (eg, reducing sick absenteeism); and reduce absenteeism pressure on other staff. The research method that will be used in this case is a literature review where through the Google Scholar database using the keywords "Counseling in the Police", "Counseling", and "Police". Based on the results of the research above, it can be seen that the police, like the general public, have both physical and psychological health which can also be disturbed. The provision of counseling, training and leadership for the police needs to be improved for the better and is mandatory for every member of the police force. This is said because in the world of work in the police, of course, every member has memories or experiences incidents that can damage the personal of the police indirectly. It can be concluded that not only in the world of health, public, education and others who need counseling, but the police also need the role of counselors who help them counseling in solving problems experienced by each member of the police force.*

Keywords: *Counseling in the Police, Counseling, Police*

1. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang manusia tentu membutuhkan adanya konseling bagi dirinya sendiri untuk membantu mereka dalam mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah yang menjadi keluhan dalam dirinya. Terutama bagi para karyawan dan pekerja terkhusus yang bekerja di instansi yang mengalami tekanan dalam pekerjaan yang dijalannya seperti tuntutan pekerja, kurangnya komunikasi antar karyawan dan boss. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan besar bagi instansi yang mempunyai tanggung jawab atas karyawannya.

Konseling merupakan suatu proses pertolongan yang membuat orang diberdayakan untuk hidup yang menghidupkan dan memanusiakan sesama manusia. Hal itu berarti bahwa konseling tidak hanya sekedar membawa orang keluar dari keterpurukan dan penderitaan hidup tetapi membantu mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya untuk memberdayakan dirinya dan juga orang lain. Asumsi dasar yang mendasari konseling masyarakat mengarah pada pendekatan

multifaset untuk membantu. Artinya bahwa konseling masyarakat menggunakan lebih dari satu pendekatan agar proses konseling dapat berjalan dengan baik. Konseling masyarakat merupakan bentuk pertolongan secara komprehensif yang didasarkan pada kompetensi multikultural dan keadilan sosial.

Konseling dilakukan oleh konselor (non-penyidik) yang berasal dari Lembaga lain melalui mekanisme kerjasama. Konseling kepada tersangka/pelaku ditingkat kepolisian selain memberikan penyadaran atas kesalahan dan tanggungjawab dari pelaku ditingkat kepolisian selain memberikan penyadaran atas kesalahan dan tanggung jawab dari pelaku. Proses konseling di kepolisian rentan menimbulkan resiko-resiko “konseling” dan “lembaga” mana yang berwenang melaksanakan dan mengawasi.

Polisi adalah sebuah profesi kerja yang bertugas untuk menjamin penegakan hukum dan terjaganya keamanan masyarakat. Terkait dengan tugas penegakan hukum polisi bekerja untuk memerangi kejahatan, yaitu dengan menekan tingkat kejahatan yang terjadi di lingkungan. Melalui sebuah proses penegakan hukum yang objektif. Contoh kasus psikologis yang sangat mempengaruhi petugas adalah penggunaan senjata api yang tidak pada tempatnya. Pada satu titik ini akan mempengaruhi wilayah kesadaran sehingga mengalami traumatis. Hal ini yang menjadi peran psikolog kepolisian untuk memastikan tindak dan perilaku anggota apakah telah sesuai dengan prosedur atau tidak. Polisi yang melakukan penembakan juga memiliki tekanan-tekanan traumatis di dalam proses mentalnya (post traumatic syndrome).

Dalam hal ini seperti pada kepolisian yang dalam menjalankan tugasnya tentu diharuskan untuk disiplin baik secara fisik maupun mental mereka. Hal ini sering terjadi biasanya disebabkan banyaknya insiden yang tidak terduga yang menjadi tanggung jawab dan tuntutan kepolisian untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh atasan. Hal ini membuat para polisi untuk harus profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga banyak polisi yang mengalami tingkat stress yang tinggi. Penyebab stress ini pula tidak hanya muncul dari lingkungan pekerjaan tetapi juga dari luar lingkungan pekerjaan misalnya dalam kehidupan keluarga yang kurang harmonis, masalah keuangan, dan masalah pribadi lainnya yang dihadapi oleh polisi.

Proses konseling sendiri diperlukan untuk dilakukannya pemeriksaan kesehatan yang meliputi mental, serta fisik, fokus kesejahteraan yang disarankan untuk mengurangi stigma konsultasi untuk masalah, menguntungkan individu secara langsung; membuat penghematan keuangan untuk organisasi (misalnya, mengurangi ketidakhadiran karena sakit); dan mengurangi tekanan ketidakhadiran pada staf lain. Ketentuan konseling untuk petugas yang mengalami depresi telah disarankan sebelumnya, penerangan tinggi bahwa konseling semacam itu harus tersedia tanpa potensi implikasi hukuman dari penggunaan layanan semacam itu (Tewksbury & Copenhaver, 2016).

2. METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam hal ini adalah *literature review* dimana melalui database Google Scholar yang menggunakan keyword “*Konseling di Kepolisian*”, “*Konseling*”, dan “*Polisi*”. Dalam pencarian peneliti menemukan kurang lebih 20 jurnal dan kemudian jurnal tersebut diseleksi, terdapat 4 jurnal yang sesuai dan bisa dilakukan review. *Literature Review* yang digunakan dikelompokkan data-datanya yang sejenis sesuai dengan hasil yang dinilai untuk menjawab dengan menggunakan metode naratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebutuhan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Petugas dan Staf Polisi di Skotlandia (Evangelia Demou, Hannah Hale dan Kate Hunt)

Dalam penelitian jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami masalah kesehatan mental (MH) dan faktor resiko kesehatan mental yang buruk pada petugas dan staf Police Service of Scotland (PSoS). Hasil dari penelitian ini adalah Tiga puluh Pengawas diwawancarai (n = 20 pria, n = 10 wanita). Dua puluh lima bekerja terutama di lingkungan perkotaan, tiga di daerah pedesaan

dan dua telah bekerja di kedua konteks. Peserta memiliki masa kerja 18 hingga 29 tahun di kepolisian dan mayoritas memiliki masa kerja 5 tahun atau kurang sebelum pensiun yang direncanakan. Delapan pemangku kepentingan yang diwawancarai (n = 6 perempuan, n = 2 laki-laki) memiliki pengalaman luas dalam PSoS dan mencakup peran strategis, termasuk dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, kewenangan dan pengelolaan kesejahteraan. Ketika ditanya tentang persepsi mereka tentang MH yang baik dan buruk dan pengalaman pribadi tentang masalah MH, peserta merasa bahwa, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, pemahaman petugas polisi tentang masalah MH telah meningkat pesat. Persepsi mereka tentang konsep MH bervariasi: beberapa membingkai MH sebagai (dalam) kemampuan untuk mengatasi stres dan beberapa mengacu pada 'berjuang', 'stres', 'kesehatan mental', dan 'situasi krisis' (lihat petugus kutipan peserta di bawah). Definisi MH jugadikaitkan dengan 'kebahagiaan'.

Stresor terkait pekerjaan utama yang dianggap berkontribusi terhadap masalah MH adalah peran pekerjaan, jam kerja/ beban kerja, dan budaya organisasi. Pengalaman peserta sendiri, kualitas pribadi dan latar belakang berdampak pada reaksi dan pengalaman mereka terhadap stresor operasional. Selaras dengan literatur terbaru, organisasional, bukan operasional, stresor dilaporkan oleh petugas dan staf sebagai pemicu stres utama. Secara keseluruhan, hasil tersebut mencerminkan pandangan bahwa setiap strategi intervensi di masa depan perlu mengakui pentingnya budaya kepolisian. Ini telah ditekankan dalam literatur yang menyatakan bahwa

2. Intervensi Konseling dan Penggunaan Keterampilan Konseling dalam Layanan Polisi di Kenya (Dr. Geoffrey Wango, Dr. Gridraph Wairire dan Dr. Luke Odiemo)

Dalam penelitian jurna ini memiliki tujuan untuk memajukan pendekatan mutidisiplin dalam penyediaan layanan psikologis konseling untuk layanan kepolisian di Kenya dengan menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutic.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah di Kenya layanan konseling telah diperluas ke layanan public, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dapat diasumsikan bahwa layanan konseling pada gilirannya dirasionalkan jika tidak tersedia untuk petugas bersenjata dan polisi. Maka dari itu peneliti merekomendasikan konseling dalam dinas kepolisian karena menyadari adanya kebutuhan untuk implementasi proses lain seperti proses rekretmen dan seleksi.

Karyawan di Kenya termasuk petugas polisi semakin menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang akut. Petugas polisi garis depan sering kali harus menghadapi insiden traumatis hampir setiap hari yang dapat menyebabkan gangguan psikologis dan emosional. Petugas polisi dengan gejala yang berhubungan dengan stress dan depresi membutuhkan bantuan, dan pada waktu yang tepat. Psikologi konseling, melalui pendekatan interdisipliner, dapat menyediakan berbagai layanan dukungan sosial yang berfokus pada masalah untuk membantu petugas dalam kesulitan situasional. Ada berbagai insiden yang sangat penting yang mencerminkan kebutuhan psikologis intervensi dalam layanan kepolisian Kenya. Layanan psikologis konseling dapat membantu dalam berbagai layanan termasuk menawarkan bantuan kepada sebagian besar petugas polisi yang mengalami masalah psikologis.

Dalam konteks layanan polisi Kenya, konselor yang merupakan karyawan tetap dapat direkrut oleh kepolisian sebagai konselor atau sebagai petugas polisi dengan keterampilan konseling prasyarat. Orang-orang yang sudah bekerja sebagai petugas polisi yang memiliki kecenderungan untuk profesi membantu juga bisa melatih dalam konseling, dan pada gilirannya digambarkan dari pekerjaan polisi sehari-hari dan dengan demikian menjadi konselor profesional. Praktisi independen tidak harus menjadi petugas polisi atau pekerja di kepolisian. Konseling dalam pelayanan kepolisian harus fokus utama pada empat tingkatan: antarmuka antara petugas sebagai klien dan konselor pada masalah pribadi; petugas sebagai klien yang berhubungan dengan pekerjaan menekankan; penggunaan keterampilan konseling oleh petugas dalam pekerjaan mereka; Sebuahnd, psikologi forensik. Peran praktisi psikologi konseling akan membantu petugas mendefinisikan makna hidup, seperti yang diartikulasikan oleh Yalom (1980), di mana makna dalam hidup (MIL) memiliki tujuan, sasaran dan rasa koherensi. Pada akhirnya, semua layanan kepolisian harus selaras dengan Konstitusi (Republik Kenya, 2010) dan terkait dengan etika profesional (*American Counseling Association, 2014; Bond, 2000; Republic of Kenya, 2014; Wango, 2011, 2013, 2015*).

3. Pemeriksaan Psikologi terhadap Anggota Polri di Jajaran Polda Jawa Timur yang Melakukan Pelanggaran Disiplin. (Nophaz Hanggara Aputra)

Dalam penelitian jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran psikologi di kepolisian dalam hal pemeriksaan psikologi terkait anggota polri yang bermasalah (pelanggaran disiplin). Serta mengetahui apa saja kendala dalam pemeriksaan psikologi yang berkaitan dengan anggota polri yang bermasalah.

Hasil dari penelitian ini di dapatkan dalam pelaksanaan sebuah profesi tentunya memiliki kode etiknya masing-masing, kode etik ini harus di taati untuk menjadikan para pelaksana profesi berkualitas, dapat mengontrol etos kerja anggotanya, serta menjaga kehormatan dan nama baik sebuah profesi. Sama halnya dengan kepolisian, tidak jarang di dapatkan adanya pelanggaran kode etik didalam anggota kepolisian dan pelanggaran tersebut pastinya akan ditindaklanjuti, terutama jika pelanggaran terus-terusan berlanjut. Oleh karena itu disinilah pentingnya peran konselor sebagai pencegah dan meminimalisir para pelaku pelanggaran tersebut. Dalam kepolisian sendiri psikolog atau konselor sendiri memiliki peran yaitu : membantu untuk pengenalan masalah yang menyebabkan tindakan yang tidak disiplin dari anggota kepolisian tersebut, memberikan kesadaran, kepatuhan serta penerapan terhadap tanggung jawab dari anggota polri, membantu memberikan pengawasan secara rutin untuk memantau proses perencanaan, pelaksanaan serta untuk mencapai kinerja yang baik. Disini juga konselor memberikan saran terhadap tindak lanjut atau hukuman terhadap penyimpangan yang ditemukan di kepolisian, hukuman harus di berikan setimpal dengan pelanggaran apa yang dilakukan.

Dalam penyelenggaraannya pologi di kepolisian sendiri prosedur dalam pelaksanaannya di atur pada standar operasional prosedur konseling dari personal polda masing masing daerah. Salah satu contoh dari peggaraan dalam kepolisian adalah penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya. Inilah yang menjadikan peranan konselor untuk memastikan bahwa tindak dan perilaku dari anggota kepolisian telah sesuai dengan prosedur atau tidaknya.

Konseling dalam kepolisian ini sebenarnya bukanlah hal yang baru dikarenakan anggota kepolisian perlu di berikan bantuan, mengingat bagaimana tuntutan kerja para anggota kepolisian. Dalam konseling di kepolisian pun memiliki kendala dalam penyelenggaraannya seperti masih kurangnya pemahaman para jajaran kepolisian terhadap konselor sebagai konsultan dan pembimbing dari sikap pesonil di kepolisian, masih minimnya tenaga konseling yang benar-benar lulusan atau bergelar professional dalam hal konseling, sehingga yang menjadi konselor di kepolisian kurang memahami serta menyulitkan dalam melakukan pendekatan.

4. Mediasi Perceraian Melalui Konseling Keluarga Brimob Polda Jabar (Vina Vionita, Chatib Saefullah, Zainal Mutaqin)

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan mediator dalam memeditasi keluarga yang akan bercerai pada satuan brimob polda, mengetahui factor yang menghambat serta factor yang mendukung dalam mediasi satuan brimob polda daam menanggulangi perceraian.

Dari hasil penelitian di dapatkan komandan dan wakil komandan beserta istri, tugas dari setiap komandan yaitu memberikan binaan terhadap anggotanya, sehingga pada saat anggotanya terjadi perceraian maka komandan lah yang akan menjadi konselor bagi anggotanya. Pada mediasi awal komandan peleton lah yang akan menjadi konselornya, dan pada mediasi ke dua komandan kompi, wakil beserta istri yang akan menjadi konselor dalam mediasi. Jika dalam tahap ke2 juga gagal maka tahap ketika yang merupakan tahap terakhir dalam mediasi akan dipimpin oleh komandan dan wakil komandan batalyon beserta istri. Upaya yang dilakukan untuk mediator atau konseling pada markas dengan mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak, konselor mengamati perilaku yang di timbulkan, pemetaan dari masalah, memberikan pandangan kedepannya, memberikan nasihat, membeikan jalan keluar serta memberikan motivasi serta arahan kepada anggota untuk menyelesaikan konfliknya.

Dalam pelaksanaan mediasi memiliki factor penghambat antara lain tidak hadirnya pihak yang bersangkutan dalam mediasi, tidak adanya keinginan dari pihak untuk menjalankan mediasi, pihak suami telah memberikan talak tiga epada isteri serta sudah siap menerima resiko dari instansi.

Sedangkan factor pendukungnya yaitu brimob sendiri memiliki aturan tentang talak cerai dan rujuk sesuai dengan Perkap Nomor 9 tahun 2010 untuk para anggota sehingga dengan aturan ini diharapkan dapat mengendalkan terjadinya peningkatan kasus perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa kepolisian sama halnya seperti masyarakat umum sama-sama memiliki kesehatan baik secara fisik maupun psikis yang bisa juga terganggu. Penyediaan konseling, pelatihan dan kepemimpinan bagi kepolisian perlu ditingkatkan menjadi lebih baik dan diwajibkan untuk diikuti oleh setiap anggota polisi. Hal ini dikatakan karena dalam dunia kerja dikepolisian tentu setiap anggota memiliki kenangan atau mengalami insiden yang dapat merusak pribadi polisi tersebut secara tidak langsung. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dari insiden yang dialami polisi adalah dari pelanggaran dalam keppolisian yaitu penggunaan senjata api yang masih sering terjadi tidak sesuai dengan tempat dan waktu yang seharusnya. Inilah yang menjadi point utama peran para konselor untuk memastikan dengan tepat bahwa tindak dan perilaku anggota kepolisian telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dalam dunia kepolisian sendiri konselor memiliki peran yang sangat penting, yaitu : membantu dalam pengenalan masalah yang menyebabkan kondisi kesehatan mental anggota polisi terganggu, memberikan rasa sadar bagi polisi, dan membantu memberikan pengawasan dan pemeliharaan secara rutin untuk memantau proses perencanaan, pelaksanaan serta untuk kinerja yang baik.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dalam dunia kesehatan, public, pendidikan serta lainnya saja yang membutuhkan konseling, namun pihak kepolisian pun juga membutuhkan peranan konselor yang membantu mereka konseling dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh setiap anggota kepolisian. Banyak hal yang dapat mengganggu kesehatana anggota polisi baik secara fisik maupun psikis. Salah satu contoh yaitu dalam pelaksanaan tugasnya tentu anggota polisi mengalami berbagai insiden yang menjadi beban pikiran para polisi dan banyaknya tekanan yang harus dijalankan oleh setiap anggota polisi. Maka dari itu penting adanya konselor dalam setiap kepolisian, para konselor dapat diperoleh dari orang-orang diluar anggota polisi yang sejatinya memiliki tingkat pendidikan konselor yang baik dan pantas dan mampu membantu polisi dan penyelesaiannya. Namun para konselor juga dapat diperoleh dari dalam anggota polisi tersebut dimana dilihat dari tugas dan profesi anggota polisi tersebut dapat memenuhi tingkat yang dibutuhkan atau tidak.

REFERENCES

- Dornik Djini, Tomi Itje. *Polmas sebagai Pioner Polri Berbasis Sasadu dalam Konseling Publik*. Vol. 2 (Desember) : 121-133. 1 November 2021
- Dr. Geoffrey Wango, Dr. Gridraph Wairire dan Dr. Luke Odiemo. *Intervensi Konseling dan Penggunaan Keterampilan Konseling dalam Layanan Polisi di Kenya*. IOSR Journal Of Humaniora dan Ilmu Sosial (IOSR-JHSS), Volume 23, Edisi 7, Ver.6(Juli 2018) PP 39-52, e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
- Evangelia Demou, Hannah Hale dan Kate Hunt. *Memahami kebutuhan kesehatan mental dan kesejahteraan petugas dan staf polisi di Skotlandia*. PRAKTIK DAN PENELITIAN KEPOLISIAN 2020, VOL. 21. 6, 702-716 <https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1772782>.
- Nophaz Hanggara aputra. *Pemeriksaan Psikologi Terhadap Anggota Polri Di Jajaran Polda Jawa Timur yang Melakukan Pelanggaran Disiplin*. Vol.7, No.1, April 2018. P-ISSN: 2303-2898.
- Selena Verde, Rafael Santna, Romel Gutierrez, Reyes, Joana Miranda, Talia Barruga, Ulises Jimenez, Adrian Poblano. *Arsitektur Tidur di Polisi Pekerja Shift Malam Petugas dengan Obstructive Sleep Apnoea-Hypopnea Sindroma*. 16 Oktober 2017. DOI : 10.5935/19840063.20170024
- Vina Vionita, Chatib Saefullah, Zainal Mutaqin. *Mediasi Perceraian Melalui Konseling keluarga Brimob Polda Jabar*. Vol.8, Nomor 1, 2020,77-96. ISSN : 2086-4116 (Print), 2685-3760 (online).
- Idayu Para. *Pembinaan Psikologi Polri Guna Meningkatkan Kuliatas Sumber Daya Manusia*. p-ISSN :2528-3642
- Dornik Djini, Tomi Itje. *Pilmas Sebagai Pioner Polri Berbasis Sasadu Dalam Pendekatan Konseling Publik*. 1 November 2021. Vol.1 No. 2(Desember) : 121-133
- Bella Moriska, Udin Supriadi, Toto Suryana. *Pembinaan Keislaman Bagi Anggota Dan PNS Polri Di Kepolisian Daerah Jawa Barat*. Vol. 3 Nomor 1, 2016
- Ellya Hemud. *Aplikasi Sistem Informasi Data Psikologi Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Biro Sumber Daya Manusia*. KOnfeksi Nasional Sistem Informasi 2018.